

Peran dinas komunikasi dan informatika dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kabupaten Sampang

Septian Eko Haryansyah^{1,*}, Zulviar Anas²

¹ Institut Teknologi dan Bisnis Nazhatut Thullab Al – Muafa Sampang, Indonesia

^{*)} Korespondensi (e-mail: ryanharyansyah18@gmail.com)

Abstract

The high level of violations in the use of social media and the lack of public knowledge about ethical and responsible information creates several problems in information and communication. In this case, the communication and informatics department of Sampang Regency plays a role in creating ethical and responsible information. Based on this, the researcher wants to research the role of the communication and informatics department in creating ethical and responsible information in the Sampang Regency. This study aims to determine the role of the communication and informatics office in creating ethical and responsible information and the factors that influence the role of the communication and informatics office in creating ethical and responsible information in the Sampang Regency. This study uses the concept of role theory, which explains several indicators such as informants, facilitators, and mediators. Based on the research, it can be seen that the role of the communication and informatics department in creating ethical and responsible information in Sampang Regency is still not maximized. Furthermore, the influencing factors are communication, resources, facilities, funds, and budget.

Keywords: Role theory, Communication Ethics, organization Development

Abstrak

Tingginya tingkat pelanggaran dalam penggunaan media sosial dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi yang beretika dan bertanggung jawab membuat beberapa permasalahan dalam aspek informasi dan komunikasi. Dalam hal ini dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Sampang berperan dalam menciptakan informasi yang beretika dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengadakan penelitian tentang peran dinas komunikasi dan informatika dalam menciptakan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kabupaten Sampang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas komunikasi dan informatika dalam menciptakan informasi yang beretika dan bertanggung jawab, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran dinas komunikasi dan informatika dalam menciptakan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan konsep *role theory*, yang menjelaskan beberapa indikator seperti informan, fasilitator, dan mediator. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa peran dinas komunikasi dan informatika dalam menciptakan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kabupaten Sampang masih belum maksimal. Dan faktor yang mempengaruhi adalah komunikasi, sumber daya dan sarana serta dana dan anggaran.

Kata kunci: *Role theory, Etika Komunikasi, Pengembangan Organisasi*

How to cite: Eko Haryansyah, S., & Anas, Z. (2021). Peran dinas komunikasi dan informatika dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kabupaten Sampang. *Journal of Management and Digital Business*, 1(3), 153-162. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v1i3.326>

1. Pendahuluan

Saat ini perkembangan jumlah usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin meningkat mencapai 60 juta di seluruh wilayah Indonesia. UMKM sendiri bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Perkembangan pesat jumlah UMKM (Sutantohadi & Wakhidah, 2018). Di era globalisasi seperti sekarang ini merupakan suatu era yang menuntut sebuah perubahan yang begitu besar dan memiliki efek secara signifikan di dunia, salah satunya adalah berkembangnya komunikasi dan informasi di Indonesia. Apalagi di Indonesia menghadapi era globalisasi 4.0 yang merupakan internet menjadi gaya hidup manusia (Risdianto, 2019). Dan Seiring dengan pesatnya penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung informasi, mulai sistem komunikasi sampai alat komunikasi. Indonesia sebagai negara yang berkembang, mengadaptasi berbagai teknologi informasi. Penggunaan internet mulai menjadi makanan sehari – hari.

Berdasarkan laporan dari berbagai organisasi maupun pemberitaan terjadi kenaikan pelaporan kasus UU ITE, seperti yang diberitakan oleh media asing *Defending digital rights in Southeast Asia* terjadi kenaikan pelaporan kasus ditahun 2020 hingga tahun 2021. Sekitar 67 persen (57 kasus menjadi 93 kasus) terjadi di tahun 2021. Angka rata-rata kasus UU ITE. Sebanyak 82 persen (73 orang) dari kasus tersebut dilakukan oleh laki-laki sedangkan sisanya 18 persen (27 orang) dari kasus yang dilakukan oleh perempuan. Berdasarkan data kementerian Informasi dan Komunikasi (KOMINFO) sampai saat ini Indonesia menempati peringkat ke-6 di dunia sebagai pengguna media komunikasi dan informasi yang berbasis internet pada media sosial.

Menurut Augustina (2019) Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan. Di Kabupaten Sampang sendiri perkembangan komunikasi dan informasi berkembang cukup pesat, berdasarkan data Diskominfo Kabupaten Sampang jumlah pengguna internet sekitar 769.694 orang pengguna media komunikasi informasi (BPS Jawa Timur 2020). Organisasi yang di percaya sebagai pengelola komunikasi dan teknologi informasi di Kabupaten Sampang adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang juga berperan sebagai melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi dengan berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi sehingga menjadi pusat informasi bagi kebutuhan pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Diskominfo Kabupaten Sampang memiliki Visi “Terwujudnya pelayanan yang prima dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi”, sedangkan Misi “Meningkatkan kapasitas layanan dengan mengembangkan infrastruktur teknologi

informatika, pemberdayaan potensi masyarakat dan kerjasama lembaga komunikasi dan informasi serta mewujudkan aparatur yang professional dan berintegritas. Rumusan Visi dan Misi ini disusun untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Sampang.

Dalam program yang sudah dilakukan sejauh ini DISKOMINFO sendiri dalam upaya mewujudkan misinya baru merealisasikan 1 program saja yaitu pelatihan bidang SDM komunikasi dan informasi. Dalam mewujudkan hal Diskominfo belum cukup maksimal dalam Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab, ini terlihat dari masih minimnya realisasi program yang sudah direncanakan dalam mewujudkan misi tersebut sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan media komunikasi dan informasi sehingga terjadi kebebasan yang tidak terkontrol yang memicu beberapa pelanggaran etika dalam informasi. Berdasarkan Fenomena di atas, maka penulis tertarik meneliti peran dari Diskominfo Kabupaten Sampang.

2. Tinjauan Pustaka

Pengembangan Organisasi

Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (2015) mengemukakan bahwa Pengembangan Organisasi (*Organizational Development*) merupakan sistem yang menyeluruh yang berusaha menerapkan ilmu perilaku dengan memakai perencanaan pengembangan jangka Panjang (Thoha, 2002). Mc.Donald menyebutkan bahwa perubahan energy dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya "*feeling*" dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan (Sardiman, 2010). Cara ini ditujukan untuk mengembangkan strategi, struktur, dan proses sehingga dicapai efektivitas organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Listianto dan Setiaji (2007) menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2011), Sitepu (2013), Setiawan (2015) Hasibuan (2018), dan Susanto (2019), yang menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dari penelitian terdahulu, hubungan antara motivasi dan kinerja berbanding lurus, artinya bahwa semakin tinggi motivasi karyawan dalam bekerja maka kinerja yang dihasilkan juga tinggi.

Menurut Siagian (2012) pengembangan organisasi dikatakan sebagai instrument ilmiah dalam meningkatkan evektifitas dan kesehatan organisasi karena pengembanan organisasi mengandung unsur- unsur:

- a. Terencana
- b. Mencakup seluruh organisasi
- c. Berdampak jangka panjang
- d. Melibatkan manajemen puncak
- e. Menggunakan berbagai bentuk intervensi berdasarkan pendekatan berperilaku.

Konsep pengertian seperti ini menekankan beberapa hal yang dapat membedakan antara pembinaan organisasi dan kegiatan pengembangan organisasi lainnya. Hal-hal itu antara lain:

- a. Pembinaan organisasi dapat dipakai untuk seluruh sistem organisasi secara keseleruhan, misalnya untuk seluruh bagian dalam suatu departemen sebagai suatu sistem atau suatu unit sebagai suatu sistem dalam unit tersebut dan atau dalam suatu kelompok orang – orang tertentu.
- b. Pembinaan organisasi diamalkan berdasarkan ilmu pengetahuan perilaku, termasuk didalamnya konsep mikro seperti kepemimpinan, dinamika kelompok dan perencanaan kerja, dan konsep makro misalnya seperti strategi organisasi, struktur organisasi dan hubungan antara organisasi dan lingkungan. Pembinaan organisasi selain menekankan aspek rasional dan teknis juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosial.
- c. Pembaharuan, perubahan dan penyempurnaan yang dikenal oleh pembinaan organisasi itu secara formal bukan hanya diterapkan pada perencanaan bisnis. Akan tetapi pembinaan organisasi melibatkan sesuatu perencanaan yang mendiagnosa dan memecahkan suatu persoalan organisasi dan perencanaan ini sangat lentur dan sering kali diperbaiki manakala informasi baru terkumpul dan mengharuskan adanya perubahan.
- d. Pembinaan organisasi adalah kreasi dan konsekuensi dari perubahan itu sendiri. Usaha ini bergerak mulai dari memberikan perhatian terhadap pelaksanaan perubahan itu sendiri sampai dengan program jangka panjang menstabilkan dan melembagakan perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan didalam organisasi sendiri dan yang kedua, harus mampu menunjukkan kualitas kerja dan produktivitas yang tinggi.

Peranan Organisasi

Robbins (2006) menyebutkan bahwa peranan organisasi memiliki sejumlah karakteristik penting. Peran Instansi dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000), Darwita dan Redana (2018) dan Hasim (2020) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan menjadi suatu gejala sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus

terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi.

- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Etika Komunikasi

Menurut Haryatmoko (2007) Ada tiga pertimbangan mengapa perlu penerapan etika komunikasi:

- a. Media mempunyai kekuasaan dan efek yang dahsyat terhadap publik. Media mudah memani pulasi dan mengalienasi khalayak. Dengan demikian etika komunikasi mau melindungi publik yang lemah.
- b. Etika komunikasi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab.
- c. Mencoba menghindari sedapat mungkin, dampak negatif dari logika instrumental. Logika ini cenderung mengabaikan nilai dan makna, yang penting adalah mempertahankan kredibilitas pers di depan publik, tujuan media sebagai instrumen pencerahan kurang mendapat perhatian.

3. Metode Penelitian

Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, Menurut Bungin (2017) penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan realitas masalah yang kompleks, dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif

agar dapat memahami makna dibalik data yang tampak dan melakukan eksplorasi untuk memperjelas fenomena permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Diskominfo Kabupaten Sampang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah dengan memperhitungkan aksesibilitas, dimana lokasi penelitian mudah untuk dijangkau oleh peneliti, karena dibutuhkan waktu beberapa kali untuk melakukan penelitian. Selain itu fenomena yang diteliti masih terjadi (berlangsung).

Informan Peneliti

Informan penelitian yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta yang mengerti akan permasalahan yang diteliti. Data atau informasi yang diteliti harus ditelusuri seluas- luasnya (sedalam mungkin) agar peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh, maka didalam penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara menggunakan teknik snowball *sampling* yaitu suatu teknik penarikan informan yang menyerupai pembuatan bola salju, yaitu semakin lama menggelinding semakin besar. Dimulai dengan jumlah yang sedikit dan akhirnya menjadi banyak. Pertama, menentukan beberapa informan yang dianggap mengerti tentang masalah yang ingin diteliti, selanjutnya dari beberapa informan yang ada akan memberikan petunjuk informan selanjutnya untuk diwawancarai ataupun observasi, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
- b. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (1 Orang)
- c. Masyarakat (2 Orang)

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data Primer yang didapatkan dari Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Sampang Nomor 66 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Sampang.

Teknik pengumpulan data adalah tatacara atau teknik pencarian data, baik yang berasal dari sumber atau objek penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Teknik Kepustakaan

Analisis Data

Untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap data penelitian ini penulis melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penulis mengambil teknik triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Nasution (2003) berpandangan triangulasi dapat dilakukan

dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

4. Hasil dan Pembahasan

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam mewujudkan Informasi yang Beretika dan Bertanggung Jawab

Sebagai mana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dalam latar belakang masalah yaitu Bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam mewujudkan Informasi yang bertanggung jawab. Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung. Dengan demikian keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Informasi yang bertanggung jawab akan berimplikasi pada keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Dinas yang berperan dalam mewujudkan informasi yang bertanggung jawab sesuai dengan Misi Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang. Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian Corry (2009) bahwa etika berkomunikasi dalam penyampaian aspirasi ikut berperan untuk mewujudkan informasi yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu untuk melihat bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Informasi yang bertanggung jawab pada uraian berikut dapat dijelaskan:

a. Informan

Berperan Sebagai Informan adapun yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Melalui Bidang Informasi publik adalah Sosialisasi Tentang Informasi yang beretika dan bertanggung jawab.

b. Fasilitator

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang yang berperan sebagai fasilitator sudah cukup efektif dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang telah melakukan fasilitasi terhadap pegawai atau aparatur juga masyarakat melalui beberapa pelatihan dan diklat juga berperan aktif dalam mencegah tersebarnya berita atau informasi yang tidak beretika dan bertanggung jawab dengan melakukan pemblokiran dan teguran kepada pihak yang menyebarkan informasi.

c. Mediator

Dari wawancara yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa Dinas komunikasi berperan sebagai media yang menengahi beberapa masalah informasi dengan tujuan jika terjadi permasalahan agar dapat mengklarifikasi masalah tersebut sebelum di proses ke pihak yang berwajib.

Faktor–Faktor Penghambat Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang yang Beretika dan Bertanggung Jawab di Kabupaten Sampang

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam mewujudkan Informasi yang bertika dan bertanggung jawab masih ditemui beberapa kendala yang menyebabkan untuk mewujudkan informasi yang bertika dan bertanggung jawab tersebut terhambat dan kurang optimal. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di jelaskan penulis akan memaparkan faktor-faktor yang menghambat peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam mewujudkan Informasi yang bertika dan bertanggung jawab di Kabupaten Sampang.

a. Komunikasi

Dari wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa komunikasi yang kurang baik terjadi dalam sosialisasi ini ditandai dengan kurang meratanya atau masih ada masyarakat yang tidak paham tentang sosialisasi tersebut disini terlihat Dinas Komunikasi dan informatika hanya terfokus pada pihak instansi atau sekolah saja dalam mengkomunikasikan sosialisasi informasi yang beretika dan bertanggung jawab namun kepada masyarakat umum sangat kurang

b. Sumber Daya Manuasia dan Sarana Pendukung

Dari kutipan wawancaara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat Dina Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan infromasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kabupaten Sampang. Sarana dan prasarana layanan informasi publiik yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Infomatika dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sarana Informasi Layanan Publik

No	Uraian	Jumlah
1	Digital Signage (Anjungan Informasi)	2
2	Media Center	2
3	Mobil PLIK	2
4	Mobil Unit Penyebarluasan Informasi	1
5	Newsroom	1
6	Ruang PPID	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki keterbatasan dari segi jumlah dalam sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas.

Tanpa sarana dan prasarana yang lengkap Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengakibatkan terhambatnya tujuan dalam mewujudkan Informasi yang bertika dan bertanggung jawab sehingga akan tetap terjadi peningkatan kasus pelanggaran informasi yang bertika dan bertanggung jawab.

c. Dana dan Anggaran

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kegiatan yang hendak dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhambat atau terkendala oleh

pengelolaan anggaran. Anggaran yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika di rasa kurang cukup untuk mengembangkan setiap program yang ada.

5. Kesimpulan

Peran Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Kabupaten Sampang sudah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya belum merata dengan dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang telah melakukan beberapa program dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab seperti Edukasi Internet sehat dan cakap, Stop *bullying*, Pelatihan kepada pegawai hingga melakukan teguran dan pemblokiran terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Sampang, dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sampang, Institut Teknologi dan Bisnis Nazhatut Thullab Al – Muafa Sampang yang telah berkontribusi memberikan strategi sehingga peneliti ini dapat diselesaikan dengan sukses.

Referensi

- Augustinah, Fedianty & Widayati. 2019. Pemanfaatan media social sebagai sarana promosi makanan ringan kripik singkong di Kabupaten Sampang. *Junal Dialektika*, Volume 4 nomor 2
- Brahmasari, I. A., & Suprayetno, A. (2008). Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 10(2), 124-135.
- Bungin, Burhan. (2017). Edisi Kedua Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
- Corry, A. (2009). Etika berkomunikasi dalam penyampaian aspirasi. *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, 1(1), 14-18.
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus*, 9(1).
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly Jr, J. H. (2015). Organisasi: perilaku, struktur, proses, Edisi ke 8, Jilid 1 (terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Haryatmoko, E. K. (2007). Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi. *Kanisius. Yogya*.
- Hasibuan, S. M. (2018). Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 1(1), 71-80.
- Hasim, D. (2020). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach pada Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak

- Numfor. *Sosio e-Kons*, 12(02), 138-149.
- Listianto, T., & Setiaji, B., (2007). Pengaruh Motivasi, Kepuasan, dan *Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di Lingkungan Pegawai Kantor PDAM Kota Surakarta)*. <http://www.damandiri.or.id>. Diakses Tanggal 29 Agustus 2015
- Risdianto, E. (2019). Analisis pendidikan indonesia di era revolusi industri 4.0. *April*, 0–16. Diakses pada, 22.
- Riyadi, S. (2011). Pengaruh kompensasi finansial, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan manufaktur di Jawa Timur. *Jurnal manajemen dan kewirausahaan*, 13(1), 40-45.
- Robbins, S. P. (2006). Perilaku Organisasi, ed. 8 da 10, Ahli Bahasa: Hedayana Pujaatmaka, PT. *Prehalindo, Jakarta*.
- Sardiman, A M., (2010). *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*. Penerbit Rajawali Pers: Jakarta.
- Setiawan, K. C. (2015). Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan level pelaksana di divisi operasi PT. Pusri Palembang. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 1(2), 43-53.
- Siagian, S. P. (2017). *Teori pengembangan organisasi*. Bumi Aksara.
- Sitepu, A. T. (2013). Beban kerja dan motivasi pengaruhnya terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Susanto, N. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Divisi Penjualan PT Rembaka. *Agora*, 7(1).
- Sutantohadi, A., & Wakhidah, R. (2017). Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-5.
- Thoha, M. (2003). Pembinaan Organisasi: proses diagnosa dan ntervensi.